

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab pada mulanya diawali oleh adanya deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948 pasca adanya Mandat Britania, yang kemudian direspon negara-negara Arab dengan serangannya ke Israel. Perseteruan negara-negara Arab dengan Israel masih terus berlanjut dengan adanya perang pada 1967. Dimana pada perang tersebut pihak Israel selalu berhasil memukul negara-negara Arab. Kegagalan negara-negara Arab pada perang 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia. Sejak itulah konflik antara Israel dan Palestina semakin meruncing. Hingga saat ini konflik antara Israel dan Palestina belum juga menemukan resolusi yang pas bagi kedua belah pihak. (Pradana 2012)

Berbagai upaya proses perundingan damai telah dilakukan, yaitu Camp David I pada tahun 1979, Perjanjian ini menghasilkan satu putusan yaitu pengakuan Israel oleh Mesir, dan sebagai imbalannya Israel menarik pasukannya dari Sinai. Sayangnya perjanjian ini tidak berhasil karena perang Arab-Israel kembali berkobar. Yang kedua yaitu Konferensi Perdamaian di Madrid pada tahun 1991, Konferensi ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Uni Sovyet dengan mengajak negara-negara Arab seperti Suriah, Mesir, Lebanon, Yordania dan pihak Palestina, namun bukan PLO. Akibatnya perjanjian ini dianggap gagal karena tidak mengajak wakil sah Palestina yang diakui PBB yakni PLO. Yang

ketiga yaitu Perjanjian Oslo I pada tanggal 13 September 1993, Perundingan ini dihadiri oleh Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin, disaksikan oleh Bill Clinton dan Raja Hussein. Hasil utama perjanjian ini adalah pengakuan eksistensi PLO dan Israel dengan cara pembentukan dua negara dalam satu wilayah. Selanjutnya yaitu Perjanjian Oslo II pada tanggal 28 September 1995, Perundingan ini sebagai kelanjutan perundingan pertama dan memutuskan untuk memberikan otonomi terbatas pada PLO di *West Bank* yang meliputi 7 kota yaitu Jenin, Nablus, Hebron, Tulkarem, Qaqiyah, Ramallah, dan Bethlehem. Perundingan ini pun dinilai gagal karena adanya protes kelompok akar rumput dari kedua pihak. (Fuhaidah 2012)

Proses perdamaian terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya antara lain dengan diadakannya Kesepakatan Hebron pada tahun 1997, Wye River Agreement pada tahun 1998, Sharm el-Sheikh di Mesir pada tahun 1999, Camp David II pada tahun 2000, dimana salah satu keputusan perundingan ini adalah kemungkinan kemerdekaan Palestina di Jerman Timur akan tetapi ditolak oleh Ariel Sharon PM baru saat itu. Pada Oktober tahun 2003 juga diadakan Perundingan di Geneva Swiss Perundingan diprakarsai Yossi Belilin (mantan menteri keagamaan Israel) dan Yossi Abeed Rabbo (mantan menteri penerangan). Isi perundingan ini menyepakati penyerahan 25,5% pemukiman Israel untuk bangsa Palestina. Namun perjanjian ini pun tidak mencapai hasil karena Ariel Sharon terus melakukan tindakan penyimpangan-penyimpangan. Perkembangan mutakhir saat itu bahkan menunjukkan bahwa Sharon memerintahkan pendirian zona pengaman yang tidak dapat dimasuki warga Palestina di Gaza Utara, kebijakannya diumumkan pada rapat kabinet dan pejabat keamanan pada Minggu, 25 Desember 2005.

Tindakan Ariel Sharon di atas dinilai sebagai pelanggaran paling nyata terhadap komitmen Israel menjalankan peta perjanjian damai yang didukung Amerika Serikat.

Seiring dengan dinamika konflik Palestina-Israel yang masih terus berlangsung sampai saat ini, perputaran roda pemerintahan di Israel juga tetap berjalan dengan lancar dimana tanduk pemerintahan Israel yang baru sekarang berada di tangan Partai Likud sebagai partai pemenang pemilu raya (Fuhaidah 2012). Partai Likud sendiri adalah partai nasionalis yang lahir karena sebuah ideologi, partai ini masuk kedalam dua partai besar di Israel bersama dengan partai Buruh (Milton 2009). Visi yang diusung, selalu dibawa dan selalu dipegang kuat oleh partai ini yaitu perang Timur Tengah dan kebijakan pendudukan di Palestina. Partai ini didirikan Menachem Begin pada tahun 1973 dalam aliansi dengan beberapa partai sayap kanan dan liberal. Kemenangan Likud dalam pemilu 1977 merupakan titik balik besar dalam sejarah politik negara itu, menandai pertama kalinya hilangnya kekuatan kiri. Selain itu, pemilu 1977 adalah pertama kalinya di Israel bahwa partai sayap kanan memenangkan pluralitas suara (Bsisu 2012). Partai ini pernah mengalami masa krisis ketika pemimpin nya Ariel Sharon memutuskan keluar dan membentuk partai baru. (VOA Indonesia 2005)

Namun, setelah Pemilu tahun 2009, sebagian besar partai tampak pulih kembali dari keterpurukan, dan berhasil memimpin pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tidak hanya pada tahun 2009, Hasil perolehan kursi pemilu raya Israel tahun 2013 menunjukkan Partai Likud mendapatkan 31 kursi, kemudian Partai Yesh Atid mendapatkan 19 kursi , partai buruh mendapatkan 15 kursi, Partai Bayit Yehudi mendapatkan 12 kursi dan partai lain mendapat 43 kursi yang tersisa di *Knesset* (Wikipedia 2016). Dengan demikian Partai Likud memenangkan seperempat suara di

Parlemen pada tahun 2013 yang menjadikannya juga sebagai pemenang pemilu raya Israel dan disebut sebagai “*Kingmakers*” dan memiliki *bargaining point* yang cukup tinggi di *Knesset*.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh kemenangan Partai Likud terhadap kebijakan pemerintah Israel dalam proses perundingan perdamaian antara Israel-Palestina pada tahun 2013?

C. Kerangka Berpikir

Berteori adalah suatu upaya untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi. Karena berteori adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi (deskripsi), mengapa itu terjadi (eksplanasi), dan meramalkan kemungkinan berulangnya keadaan tersebut di masa yang akan datang (prediksi). (Mas'ood 1994) Maka untuk mengetahui bagaimana orientasi politik dan pengaruh Partai Likud terhadap proses perundingan perdamaian antara Israel-Palestina pasca kemenangannya dalam pemilu raya pada tahun 2013, penulis menganalisis menggunakan pendapat para ahli mengenai model pembuatan kebijakan luar negeri, arah ideologi partai politik dan teori resolusi konflik.

1. Model Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Proses perundingan damai antara Israel dan Palestina merupakan salah satu kegiatan politik yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk mendapatkan kepentingannya.

Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan luar negeri antara lain (Mas'oeed 1994). Allison menawarkan beberapa model mengenai pembuatan kebijakan luar negeri setiap negara, salah satunya yaitu menggunakan Model Politik Birokratik.

Dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. Politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi, bargaining game antar bangsa, dengan kata lain pembuatan keputusan Politik luar negeri adalah proses sosial, bukan intelektual. Jadi dalam Model ini digambarkan suatu proses dimana masing-masing pemain berusaha bertindak secara rasional, setiap aktor Negara berusaha menetapkan tujuannya, menilai berbagai alternatif sarana dan menetapkan pilihan secara intelektual, tidak ada pemain yang bisa memperoleh apa yang diinginkan dalam bargaining ini (bisa di analogikan permainan catur).

Karena dalam Model Politik Birokratik ini menekankan *bargaining games* sebagai penentu politik luar negeri, maka dalam mempelajarinya kita harus memperoleh informasi tentang persepsi, motivasi, posisi, kekuasaan dan maneuver dari pemain-pemain yang terlibat didalamnya. Jadi kita harus tahu :

- a) Siapa yang ikut bermain? atau kepentingan, atau perilaku siapa yang punya pengaruh terhadap keputusan?
- b) Apa yang menentukan sikap masing-masing pemain itu?
- c) Bagaimana sikap-sikap para pemain itu diagregasikan sehingga menghasilkan keputusan?

Dalam studi kasus yang penulis teliti, model Politik Birokratik bisa digunakan untuk menganalisa bagaimana pengaruh partai Likud terhadap proses perdamaian yang di ambil Israel terhadap Palestina. Karena apabila kita telaah dalam kasus ini partai Likud memiliki porsi yang cukup besar dimana dalam sebuah pembuatan kebijakan suara mayoritas biasanya akan dijadikan pilihan utama. Apabila kita lihat model ketiga juga partai Likud memiliki *bargaining point* yang sangat besar di parlemen yang ada di Israel sebagai partai pemenang pemilu dimana sikap dari partai Likud sudah pasti akan bisa di agregasikan dan di artikulaskan terhadap keputusan apa yang akan diambil nantinya. Partai politik sendiri merupakan salah satu aktor dan bagian penting dalam politik domestik Israel yang telah ikut mempengaruhi dinamika kebijakan politik luar negeri negara tersebut.

Richard N. Haass dalam bukunya “Foreign Policy Begins at Home” menggambarkan bahwa dunia tidak lagi didominasi oleh satu atau lebih negara adidaya, melainkan ada fitur penting dari hubungan internasional yaitu “*nonpolarity*” dimana kekuasaan secara luas tersebar dengan hilangnya kutub kekuasaan. Dengan tersebarnya kekuasaan ini maka muncul lah aktor baru yang memiliki *power* dan kemampuan untuk menggunakan pengaruh mereka. Selain negara-bangsa, ada banyak entitas atau aktor lain yang berperan aktif dalam bidang politik dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan luar negeri, seperti Organisasi internasional (PBB, Bank Dunia), Organisasi Regional (Uni Eropa, ASEAN, NATO, Liga Arab), Perusahaan Multinasional (Exxon Mobil, Chevron), Kelompok Kepentingan dan juga Terorisme. (Haass 2013) Dalam hal ini Partai Likud merupakan salah satu aktor yang dapat dibilang sebagai bentuk “*nonpolarity*” kekuasaan karena Partai Likud dapat mempengaruhi suara di parlemen Israel karena peran nya sebagai salah satu kelompok kepentingan yang berbentuk partai politik.

Partai politik tidak hanya menjadi media demokrasi tetapi juga menjadi alat pencapaian kepentingan politis para politikusnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Djenal Hoesen, bahwa tanpa organisasi Partai tidak mungkin ada (Kusumaatmadja 1976):

- a) Penyatuan pernyataan prinsip;
- b) Evolusi yang tertib dalam merumuskan kebijakan;
- c) Pelaksanaan yang teratur daripada alat konstitusional pemilihan parlemen dan seterusnya.

Sebaliknya, besar kemungkinan akan timbul (jika tidak ada organisasi Partai):

- a) Gerombolan-gerombolan dan komplotan-komplotan liar;
- b) Permintaan-permintaan dan petisi kepada pemerintah;
- c) Persetujuan-persetujuan rakyat;
- d) Pernyataan-pernyataan dan protes.

Dalam konteks tulisan ini, Partai Likud selain sebagai partai politik yang memiliki visi *Revisionist Zionism*, yaitu klaim bahwa Israel Raya (*Eretz Israel*) yang membentang dari sungai Nil sampai Eufrat adalah hak bangsa Yahudi yang sudah digariskan Tuhan. (Pallis 1992) Partai Likud juga berperan sebagai salah satu aktor yang membuat orientasi politik yang bisa dibilang cenderung kaku dalam peran nya sebagai pembuat kebijakan terutama di parlemen atau *Knesset* yang akan berpengaruh terhadap jalan nya proses perdamaian antara Israel dan Palestina karena ideologi yang dimilikinya.

Secara ideologi antara Partai Likud dengan partai lainnya di Israel dapat dibedakan dengan dua istilah yaitu Liberal dan Konservatif. Dari segi perspektif ideologi, Partai Likud lebih condong kearah sayap kanan yang cenderung Konservatif. Pada dasarnya,

konservatisme tidak sepenuhnya menolak adanya satu perubahan. Akan tetapi, perubahan tersebut haruslah dipertimbangkan dengan matang dan tidak berpengaruh pada status quo dan kestabilan politik. Pertimbangan dalam hal ini lebih ditekankan pada sikap para petinggi partai Likud sebagai partai pemenang pemilu dalam kebijakannya terhadap proses perdamaian yang terjadi melalui resolusi konflik yang ditawarkan oleh partai Likud dimana apabila terjadi perjanjian damai sudah pasti akan menimbulkan adanya perubahan sosial dan juga kestabilan politik di Israel.

Sebagaimana diketahui bahwa partai pemenang dalam pemilu adalah partai penguasa yang membuat sebagian besar kebijakan domestik dan luar negeri berada dibawah kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Keberadaan oposisi, media massa dan kelompok penekan hanyalah sebagai alat kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan oleh partai yang berkuasa. Kebijakan yang diambil merupakan rangkuman dari berbagai kepentingan yang ada. Artinya bahwa kebijakan tersebut paling tidak telah mencakup beberapa kepentingan politik yang hendak dicapai oleh Israel dan juga aktor lainnya seperti kelompok kepentingan yang ada di Israel.

2. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Resolusi konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi. Menurut Ross (1993) bahwa resolusi konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau

agresif. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses resolusi konflik menunjukkan pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik (Sugito 2007).

Resolusi konflik tentu saja berhubungan erat dengan perdamaian. Damai biasanya berhubungan dengan perang dan kekerasan. Perdamaian merupakan kebutuhan yang mendesak dan menekan ketika terjadi perang atau kekerasan. Namun demikian, ada beberapa kebutuhan jangka panjang yang terkait dengan perdamaian diantaranya adalah keadilan, keselarasan dan pembangunan. Pandangan tradisional atau konservatif cenderung mengatakan bahwa perdamaian atau damai adalah ketiadaan perang. Namun, sebagian orang yang berfikir moderat mengatakan itu tidak sepenuhnya benar, perang mungkin saja berakhir, namun kekerasan masih tetap berlanjut. Ada perbedaan yang mendasar antara perang dan kekerasan. Perang adalah kekerasan dalam skala besar, dan kekerasan biasanya berskala kecil namun sama-sama bertentangan dengan perdamaian. Perang mungkin saja berakhir dengan adanya perjanjian perdamaian, namun damai tersebut bersifat sementara (Surwandono 2007).

Damai tidak hanya berarti ketiadaan perang dan kekerasan, namun juga harus ketiadaan dari penyebab perang dan kekerasan itu tersendiri. Untuk melihat dan mengetahui lebih jauh tentang perdamaian, berikut ini adalah beberapa pendekatan tentang perdamaian (Surwandono 2007) :

a. Pendekatan Konservatif

Pendekatan cara ini umumnya dilakukan oleh negara-negara yang telah mapan dan mempunyai kekuatan besar. Pendekatan ini memandang skeptis pada perdamaian total, usulnya adalah dengan perdamaian terbatas. Umumnya, penganut pendekatan ini

cenderung menganggap perdamaian sama dengan order dan kekerasan kekerasan diperlukan untuk menjaga ketertiban.

b. Pendekatan Pragmatis

Pendekatan ini mengasumsikan netralitas dalam berideologi, melakukan upaya pembangunan perdamaian melalui sarana yang pragmatis dan praktis. Penghentian perang merupakan salah satu tujuan utama pendekatan ini. Dalam mencapai perdamaian, mediasi oleh pihak netral dapat memainkan peran utamanya. Pelucutan senjata nuklir adalah tujuan utama. Perserikatan Bangsa Bangsa biasanya memakai pendekatan cara ini.

c. Pendekatan Keadilan Sosial

Pendekatan ini merupakan pendekatan perdamaian positif. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kekerasan struktural dan eliminasi. Ketidakadilan sosial seperti kemiskinan. Kelaparan, rasisme dan eksploitasi ekonomi adalah hasil dari kekerasan struktural. Untuk membangun perdamaian dalam jangka panjang isu-isu ini harus di tanggap secara positif. Pendekatan ini mengasumsikan sebuah tatanan sosial yang baru yang bisa mendorong kesetaraan, keadilan dan harmoni sosial.

d. Pendekatan Transformasi Pribadi

Advokasi non kekerasan adalah metode utama dari pendekatan ini seperti yang dianjurkan oleh Mahatma Gandhi dan Martin Luther King. Dalam konstitusi UNESCO menyatakan :” Karena perang dimulai di dalam pikiran, maka dalam pikiran manusia juga perdamaian itu harus dibangun”.

e. Pendekatan Tata Dunia.

Pendekatan ini populer di kalangan akademisi khususnya di bidang Hubungan Internasional. Pembangunan ini berkaitan dengan pembangunan, keadilan, dan hak asasi manusia.

f. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ini berusaha membangun hubungan antara tiga set masalah yaitu perdamaian/perang, pengembangan/lingkungan, dan hak asasi manusia/keadilan. Pendekatan ini berpendapat bahwa semua rangkaian isu itu berhubungan dan saling terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan masa depan dan perdamaian yang berkelanjutan. Menurut penganut pendekatan ini perdamaian bukan hanya ketiadaan perang atau mediasi konflik terus menerus melainkan saling memperkuat keseimbangan antara unsur-unsur emosional, ekonomi, politik, budaya, alam, etika, dan variable teknologi. Perdamaian dianggap sebagai harmoni.

Dari berbagai cara pandang orang terhadap perdamaian tersebut, penulis memilih menggunakan pendekatan konservatif untuk menganalisa orientasi politik partai Likud dalam memandang dan peran nya terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Seperti yang sudah dibahas oleh penulis sebelumnya, pendekatan konservatif percaya bahwa perdamaian dilakukan melalui kekuatan dalam hal ini adalah militer dan otoritas atau kekuasaan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ideologi Partai Likud yang berhaluan kanan dan sangat militan atau sering disebut "*Revisionist Zionism*" (Milton 2009) bahkan Partai Likud sering disebut juga "*The Fighting Family*" karena mereka lebih menekankan agresifitas dalam pengambilan kebijakan yang relatif keras atau cenderung militeristik dalam merespon ancaman, keengganan untuk negosiasi dengan teroris, dan memberikan kesan 'Israel yang kuat' melalui keamanan dan pertahanan. (Bsisu 2012)

Usul utama dari pendekatan ini adalah perdamaian terbatas, pendekatan seperti ini diumpamakan seperti adanya polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai orientasi politik Partai Likud terhadap perdamaian Israel-Palestina, pendekatan konservatif inilah yang dianggap mewakili sikap Israel terhadap Palestina. Konsep Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berasal dari partai Likud tentang perdamaian mengandung tiga pilar utama yaitu Keamanan, reciprocity (ada timbal balik antara dua pihak) dan penguatan demokrasi. Pemikiran Benjamin Netanyahu merupakan *self consciously* yang dibentuk dari dua hal penting yaitu demokrasi dan kediktatoran. Kemudian diikuti dengan dua jenis perdamaian pula yaitu “*peace of democracies*” dan “*peace of deterrence*”.

Peace of Democracies atau perdamaian demokratis adalah perdamaian yang ada diantara negara-negara Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II, sedangkan *Peace of deterrence* atau perdamaian karena takut atau tunduk adalah perdamaian yang terlihat diantara negara demokratis dan negara non demokratis atau antara dua atau lebih negara non demokratis (Drake 1996).

Apabila kita memandang perdamaian maka pendekatan perdamaian yang cocok di Timur Tengah harus didasarkan pada deterrence (pengaruh/tunduk). Perspektif ini membawa pengertian bahwa aplikasi yang tepat untuk konflik Israel - Palestina menurut Benjamin adalah “*peace through strength*” yang sesuai dengan perdamaian ala orang konservatif. Atas dasar hal tersebut maka tak heran jika dalam strateginya Benjamin percaya pada teori konfrontasi, bahwa hanya dengan konfrontasi langsung dan keras, Arab akan menurunkan harapan - harapan tingginya. Artinya, bagi Benjamin dan Partai Likud pada umumnya, perdamaian yang diraih melalui negosiasi hanyalah ‘*imaginable*

deal' (Breger dan Spiegel 1999). Alasannya, *pertama* karena ideologi zionismenya dan *kedua* karena hambatan psikologis antara Arab dan Yahudi yang sama-sama tak mau mengalah. Kelihatannya, perdamaian akan semakin kabur dengan adanya kemenangan dari Partai Likud, namun satu hal yang harus disadari bahwa penduduk Israel yang mendorong terciptanya perdamaian tidak lebih sedikit dari kontra perdamaian. Konsep Benyamin tentang perdamaian itu merupakan cerminan dari sikapnya yang memandang perdamaian melalui pendekatan konservatif, orang-orang seperti Benyamin tidak percaya pada perdamaian total, bagaimanapun perdamaian harus dibatasi. Kekerasan itu perlu untuk menjaga perdamaian. Bahkan dalam kampanyenya Benyamin juga menegaskan salah satu tujuannya, ia akan memusnahkan Hamas dan membunuh seluruh pemimpinnya. Artinya, perang akan menjadi pilihan rezim Israel yang baru dibawah Partai Likud.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa, dengan menangnya Partai Likud dalam Pemilu raya Israel tahun 2013 dan Benyamin Netanyahu terpilih kembali sebagai Perdana Menteri akan membuat perdamaian di Timur tengah semakin jauh kemungkinan terjadinya.

Selain itu juga, sikap Benyamin yang semakin Konservatif bisa dilihat dari rekan-rekan koalisi partainya (Partai Likud) di dalam pemerintahan. Benyamin berhasil membujuk partai-partai peserta Pemilu Israel untuk membentuk pemerintahan koalisi dengannya. Pada pemilu Israel bulan Januari 2013, Partai Likud berhasil memenangkan Pemilu di Negara tersebut dengan menguasai 31 kursi di *Knesset*. Pada pemilu kali ini, koalisi Partai Likud adalah partai haluan kanan yang rata-rata adalah partai yang menolak pembentukan negara Palestina. Para pakar politik justru khawatir jika pemerintahan baru Israel benar-benar murni “pemerintahan sayap kanan”. Perpaduan antara cara pandang

Benyamin Netanyahu tentang perdamaian dengan mitra koalisi Partai Likud yang beraliran kanan walaupun dengan Partai Buruh tetap membuat banyak pihak yakin bahwa perdamaian akan semakin jauh saja.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh orientasi politik partai Likud terhadap upaya proses perdamaian Israel-Palestina pasca kemenangan pemilu tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

1. Kemenangan Partai Likud membuat orientasi politik di parlemen (*Knesset*) cenderung konservatif yang menyebabkan rezim Israel baru cenderung kaku dalam menjalankan proses perundingan damai dan cenderung agresif dalam menjalankan politik luar negerinya terhadap Palestina.
2. Perang atau "*peace through strength*" menjadi pilihan rezim Israel di bawah Partai Likud untuk mencapai perdamaian, karena menurut Partai Likud perdamaian yang diraih melalui negosiasi hanyalah "*Imaginable deal*" atau angan-angan saja.

E. Batasan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan meliputi hubungan dan interaksi pemerintah Israel dan Palestina serta para mediator sejak pemerintahan Israel dimenangkan oleh partai Likud pada pemilu tahun 2013 hingga menjelang pemilu raya tahun 2015 ketika dimulainya perundingan damai dibawah perdana menteri Benyamin

Netanyahu. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan data dan fakta sebelum tahun 2013 untuk memperkuat analisa.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian mengenai orientasi politik dan pengaruh partai Likud terhadap upaya proses perdamaian Israel-Palestina ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tahapan pertama yaitu Pengumpulan Data, kedua Analisa Data dan selanjutnya Penulisan Laporan. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan dan memilah sumber data sekunder dari buku-buku pustaka, jurnal dan laporan penelitian, e-book, majalah, dan sumber elektronik (internet) yang menunjang dalam memberikan informasi mengenai negara Israel dan Palestina, sejarah dan dinamika konflik antara Israel dan Palestina, serta pengaruh partai Likud terhadap kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri Israel.

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif yang mana data yang didapatkan dalam tahap pengumpulan data akan dikelompokkan sesuai kategori dan dianalisa dengan kerangka konseptual yang digunakan lalu digambarkan secara sistematis sehingga dapat menjawab dan menghasilkan hipotesa berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Dan yang terakhir adalah penulisan laporan yang mana dari keseluruhan data yang telah didapatkan dan dianalisa akan diambil sebuah kesimpulan untuk dituliskan dalam laporan penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 5 bab besar atau garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan, terdapat sub bab yang akan memperinci atau berisi detail dari garis besar setiap bab yang sebelumnya sudah di buat atau di tulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah dalam pembaca memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

Bab I merupakan “**Pendahuluan**” yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penulisan, batasan penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai “**Dinamika Konflik dan Upaya Perdamaian yang terjadi antara Israel dan Palestina**”. Dalam bab ini penulis berusaha mengulas kembali pasang surut interaksi antara pemerintah Israel dan Palestina dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan.

Bab III merupakan pembahasan dengan judul besar “**Eksistensi dan Kemenangan Partai Likud di Israel**” dan dalam bab ini akan di ulas mengenai sistem kepartaian serta sistem pemerintahan yang ada di Israel. Selain itu dalam bab ini juga penulis mencoba memaparkan sejarah partai Likud dan kemenangannya dalam pemilu raya Israel terutama pada pemilu tahun 2013.

Bab IV penulis berusaha untuk Menganalisis “**Pengaruh Partai Likud terhadap upaya perundingan damai Israel-Palestina pasca kemenangan dalam pemilu tahun 2013**”. Dan penulis juga akan membahas mengenai Karakteristik Kebijakan Domestik dibawah kekuasaan partai Likud dan Karakteristik Kebijakan Luar Negeri dibawah kekuasaan partai Likud sebagai bagian dari bab ini untuk mengetahui bagaimana situasi

politik di Israel dibawah kekuasaan Partai Likud di parlemen dan juga mengetahui karakteristik kebijakan yang di buat oleh pemerintah Israel baik domestik maupun luar negeri. Selain itu penulis akan menyajikan faktor-faktor serta kondisi yang memperlihatkan adanya pengaruh dari Partai Likud sebagai partai pemenang pemilu Israel Raya terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh Israel dan Palestina.

Bab V berisi “**Kesimpulan**” dari pembahasan yang sudah penulis sajikan di bab-bab sebelum nya dan memberikan beberapa poin yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh Partai Likud terhadap upaya proses perdamaian.